



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pariwisata RI
Hari/Tanggal	: Selasa, 3 September 2019.
Pukul	: 14.00 s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPF RI.
Acara	: 1. Pembahasan RKA-KL TA 2020. 2. Pembahasan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh DAK 3. Lain-lain
Hadir	: 30 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Arief Yahya/Menteri Pariwisata-RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.16 oleh **Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpar RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi X DPR-RI menyetujui usulan pagu anggaran Kemenpar RI pada RAPBN TA 2020 sebesar **Rp4.377.200.491.000,-** (*Empat triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN
1	Deputi Bidang Pengembangan Industri dan kelembagaan Pariwisata	1.397.450.214.000
2	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	600.451.577.000
3	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata I	1.118.180.930.000
4	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II	914.875.306.000
5	Sekretariat Kementerian	346.242.464.000

2. Komisi X DPR-RI menyetujui Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata 2020 sebesar **Rp1.287,3 M** (*satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh juta koma tiga miliar rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

DAK	ANGGARAN	KETERANGAN
DAK FISIK	1,003 triliun	307 daerah (19 Provinsi dan 288 Kab/Kota)
DAK Non-Fisik	284,3 miliar	357 Daerah (5 Provinsi dan 352 Kab/Kota)

3. Terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 tersebut, Komisi X DPR-RI akan mengajukan ke Badan Anggaran DPR-RI.
4. Terhadap Pagu Anggaran (Sementara) Kemenpar RI pada RAPBN TA 2020, Komisi X DPR RI menyampaikan:
 - a. Menekankan agar pada tahun 2020, sektor pariwisata menjadi Top-2 penghasil devisa terbesar di Indonesia.
 - b. Pagu Anggaran Kemenpar RI berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2020 mengalami kenaikan 350 Miliar atau sebesar 8,7 % dari pagu indikatif RAPBN TA 2020 yang dialokasikan untuk Satker Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Borobudur dan Labuan Bajo. Oleh karena itu, destinasi pariwisata di tiga daerah tersebut harus lebih berkembang.
 - c. Menekankan koordinasi lebih intensif dengan K/L lain (KemenPU-PR RI, Kemenhub RI, Kemen LHK RI, Kemendes PDT & Transmigrasi RI, Kemenkop UKM RI, Kemendikbud RI, Kemenristekdikti RI dan Bekraf RI) untuk pengembangan 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
 - d. Alokasi DAK pariwisata perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi dan capaiannya, agar alokasi DAK tersebut sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu diperlukan juklak dan juknis lintas kementerian.

- e. Mendorong Kemenpar RI untuk terus meningkatkan pengelolaan 10 destinasi pariwisata prioritas (10 Bali Baru), yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
 - f. Kemenpar RI perlu mengkaji dan mengevaluasi permasalahan akses pariwisata dalam bentuk akses penerbangan, seperti mahalnya harga tiket.
 - g. Perlu menyajikan data terkait kontribusi atau peran Kemenpar RI terhadap SDM Indonesia yang unggul, diantaranya melalui Bimtek (Bimbingan Teknis).
 - h. Dalam pembahasan RAPBN TA 2020 ke depan, perlu disajikan data alokasi anggaran berdasarkan fungsi dan jenis belanja, serta target kunjungan.
 - i. Meningkatkan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman program-program strategis pariwisata.
 - j. Mengkaji dan mengimplementasikan program-program kepariwisataan dalam mendukung persiapan ibukota negara di daerah Kalimantan Timur.
5. Komisi X DPR-RI dan Menpar RI sepakat untuk melakukan pendalaman terhadap Pagu dan Program Anggaran (Sementara) RAPBN TA 2020 Kemenpar RI pada hari Kamis, 5 September 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.02 WIB